

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG



**RENCANA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN ANGGARAN 2024**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN REMBANG**

KATA PENGANTAR

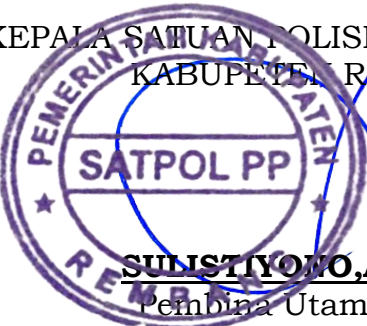
Dengan menyebut nama ALLAH SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami panjatkan puji syukur atas segala limpahan rahmat dan hidayah yang telah diberikan, sehingga Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang tahun 2024 dapat terselesaikan.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai unit kerja ketenteraman dan ketertiban dalam priode tahunan. Selain itu Rencana Kerja tahun 2024 ini disusun untuk menyediakan rencana teknis 1 (satu) Tahunan dengan berbasis pada kinerja terukur guna memudahkan dalam penyusunan laporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Sesuai dengan harapan kami Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang Tahun 2024 ini dapat bermanfaat dan menjadi acuan di dalam pencapaian kinerja perangkat daerah serta demi terciptanya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*).

Rembang, Agustus 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN REMBANG



SULISTIYONO, A.P., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730528 199311 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	4
1.1.Latar Belakang	4
1.2.Landasan Hukum	5
1.3.Maksud dan Tujuan	7
1.4.Sistimatika Penulisan	8
BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATPOL PP KABUPATEN REMBANG.	6
2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja Satpol PP Kab. Rembang Tahun 2022 dan Capaian Renstra Satpol PP Kab. Rembang 2021-2026	6
2.2.Analisis Kinerja Pelayanan Satpol PP Kab. Rembang	17
2.3.Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satpol PP Kab. Rembang	18
2.4.Review terhadap Rancangan Awal RKPD	
2.5.Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Satpol PP Kab.Rembang	19
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN SATPOL PP KABUPATEN REMBANG	39
3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Visi, Misi dan Program Bupati Wakil Bupati Kab.Rembang	49
: 3.2.Tujuan dan Sasaran Renja Satpol PP Kabupaten Rembang	
3.3.Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan Satpol pp	
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATPOL PP KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024	
BAB V : PENUTUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Satpol PP dan Pencapaian Renstra Satpol PP s/d Tahun 2022 SATPOL PP Kabupaten Rembang.....7

Tabel 2.2 Realissi Kinerja dan Keuangan Satpol PP Kab.Rembang Tahun 2022 13

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Satpol PP Kab.Rembang Tahun 2022 14

Tabel 2.4 Riview terhadap Rancangan Awal SATPOL RKPD Tahun 2024 Satpol PP 15

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegitan dari Pemangku kepentingn Tahun 2024 Kab. Rembang.....17

Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Jangka Menengah Satpol PP Kab.Rembang Tahun 2021-2026.....38

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Satpol PP Kab.Rembang Tahun Anggaran 2024 Dan Perkiraan Maju Tahun 202545

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasia Pembangunan Daerah Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Kerja Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih, untuk kemudian dituangkan kedalam Renstra PD tahun 2021-2026. Dalam pelaksanaannya, Renstra PD harus dijabarkan kembali kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Renja PD disusun setiap tahun dengan tetap berpedoman pada Renstra PD.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 merupakan penjabaran Tahun Kelima dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 – 2026. Renja-PD ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis. Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024, akan memuat isu strategis, kondisi pencapaian hingga akhir tahun 2024, pemasalahan dan tantangan berkaitan dengan sarana dan prasarana dalam Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat

Dalam kaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggung jawaban, Renja-SKPD merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Renja-PD merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

1.2. Landasan Hukum

Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang Tahun 2023 disusun atas dasar :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2020;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026
11. Peraturan Bupati Rembang nomor 23 tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021;
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 29 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Bupati Rembang nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2020;
13. Peraturan Bupati Rembang Nomor 32 tahun 2020 tentang perubahan kelima atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020.
14. Peraturan Bupati Rembang Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2021
15. Peraturan Bupati Rembang Nomor 27 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2021
16. Peraturan Bupati Rembang Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang
17. Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Tahun 2024 Satpol PP adalah sebagai Dokumen Perencanaan Tahun Anggaran 2023-2024 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran disertai indicator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Satpol PP Kabupaten Rembang.

1. Sebagai bahan masukan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024;
2. Sebagai acuan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP serta dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
3. Merumuskan program dan kegiatan Satpol PP Kabupaten Rembang selama tahun 2024 yang mengarah pada pencapaian indikator sasaran dan program yang telah ditetapkan.

Sedangkan Tujuan disusunnya Rencana Kerja OPD Satpol PP adalah untuk :

1. Menjabarkan tentang kondisi daerah sekarang sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati Kabupaten Rembang.
2. Memudahkan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mencapai tujuan dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
3. Memudahkan Satuan Polisi Pamong Praja untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional dalam rentang waktu 1 (satu) tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang Tahun 2024,

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN REMBANG

Bab ini berisi evaluasi dan analisis pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2024 dan Capaian Renstra Tahun 2021 – 2026. Program / kegiatan yang memenuhi ataupun yang tidak memenuhi target kinerja akan dikupas lebih dalam dalam bab ini berikut faktor penyebabnya serta implikasi terhadap target capaian program Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN REMBANG

Bab ini berisi telaahan mengenai tujuan dan sasaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab Rembang mengacu pada renstra dan RPJMD Kab Rembang Tahun 2021-2026.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATPOL PP KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024

Bab ini berisi uraian tentang rencana kerja dan pendanaan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi uraian tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SATPOL PP KABUPATEN REMBANG

Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam pembangunan daerah adalah berupa Peningkatan Rasa aman dalam masyarakat Pembangunan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja ditekankan pada program-program kegiatan yang dapat mendorong untuk meningkatkan keefektifan dan keefisienan dalam melaksanakan pembangunan seperti disebut diatas, diperlukan evaluasi yang fungsinya adalah mengukur sejauh mana keberhasilan pembangunan di tahun sebelumnya. Berikut akan diuraikan mengenai evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja tahun sebelumnya.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SATPOL PP Kabupaten Rembang

Bahwa Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang Tahun 2024 pada umumnya sudah sesuai dengan perencanaan dan penganggaran yang tertuang dalam RKA-DPA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang Tahun 2023 ,serta evaluasi persiapan pelaksanaan Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024

Adapun hasil pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pmong Praja Kabupaten Rembang , sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SATPOL PP dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kabupaten Rembang

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021/22	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2				3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10	11=(10/4)
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	64,55	64,35 angka	64,35 angka	64,35	100	64,55 angka	
1	1	1	1			Nilai IKM OPD	100%	100%	95%	95%	100	95%	
1	1	1	1	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase dokumen evaluasi kinerja dengan kualitas baik	80%	100%	75%	100	133,3	75%	
1	1	1	1	2		persentase perencanaan dan penganggaran OPD berkualitas ba	75%	100%	75%	100	133,3	75%	
1	1	1	1	3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dok	5 dok	5 dok	100	100	5 dok	
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 dok	3 dok	3 dok	100	100	3 dok	
1	1	1	2		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 lap	3 lap	3 lap	100	100	3 lap	
1	1	1	2	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase dokumen	75%	100%	75%	99,99	132	75%	

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2				3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10	11=(10/4)
					pelaporan dengan kualitas baik								
1	1	2	2		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	71 ASN	71 ASN	71 ASN	71 ASN	100	93 ASN		
1	1	2	3		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 dok	3 dok	3 dok	100	100	3 dok	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 lap	2 lap	2 lap	99,96	49	2 lap	
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	persentase dokumen pengelolaan BMD dengan kualitas baik	75%	75%	75%	100	100	75%	
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 lap	2 lap	2 lap	100		2 lap	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase dokumen manajemen kepegawaian yang dikelola dengan baik	100%	100%	100%	0	0	100%	
					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaia	10 dok	10 dok	10 dok	0	0	10 dok	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	99,68	99,68	100%	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	4 paket	4 paket	4 paket	3 paket	99,66	4 paket	

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10	11=(10/4)
		Bangunan Kantor yang Disediakan								
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	3 paket	3 paket	100	3,33	3 paket	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 paket	6 paket	6 paket	100	6,66	6 paket	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	3 paket	3 paket	100	3,33	3 paket	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	3 paket	3 paket	100	3,3	3 paket	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 dok	1 dok	1 dok	99,77	99,77	1 dok	
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	99,98	99,98	1 paket	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 lap	2 lap	2 lap	98,49	4,92	2 lap	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemenuhan layanan administrasi	100%	100%	100%	97,00	100	100%	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 lap	1 lap	1 lap	86,21	86,21	1 lap	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	Jumlah Laporan	3 lap	3 lap	3 lap	93,49	3,6	3 lap	

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 20212	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10	11=(10/4)
	Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kantor yang Disediakan								
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 lap	2 lap	2 lap	97,62	4,81	2 lap		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase dokumen pengelolaan BMD yang terpelihara dengan baik	75%	75%	75%	98,61	13,1	75%		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajakny	34 unit	34 unit	34 unit	31 unit	98,46	34 unit		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				98,69				
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	3 unit	3 unit	0	0	3 unit		
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	% Kecamatan yang kondusif	80%	80%	80%	76%	97,07	80%		
		% Penegakan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	80%	80%	80%	76%	97,07	83%		
		Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban,	100%	100%	100%	76%	97,07	80%		

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 20212	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10	11=(10/4)
		Ketentraman, Keindahan								
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	persentase kelompok sasaran tibumtranmas yang terbina	80%	80%	80%	77	97,07	80%		
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	4 kasus	5 kasus	4 kasus	2 kasus	52,96	4 kasus		
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	4 kasus	5 kasus	4 kasus	3 kasus	99,26	4 kasus		
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat	1 dok	1 dok	1 dok	0	0	1 dok		

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 20212	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10	11=(10/4)
		Kabupaten/Kota								
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 orang	5 orang	5 orang	2 orang	40	5 orang		
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	jumlah warga negara yang memperoleh layanan akiba penegakan hukum perda /perkada	100%	100%	100%	82,10	82,10	100%		
		persentase pelanggaran perda/perkada yang tertangani	80%	80%	80%	82,10	102,6	80%		
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	4 laporan	3 laporan	4 laporan	2 lap	50	4 laporan		
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap	64 laporan	64 laporan	64 laporan	50 lap	76,2	64 laporan		

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021/2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10	11=(10/4)
		Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota								
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	64 laporan	64 laporan	64 laporan	55 lap	85,9	64 laporan		
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	persentase peningkatan SDM PPNS	80%	80%	80%	71,75	89,7	80%		
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	8 laporan	8 laporan	8 laporan	7 lap	0,75	8 laporan		

Dari tabel 2.1 diatas maka pokok-pokok evaluasi yang diuraikan adalah sebagai berikut :

- Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi / yang memenuhi/ didukung oleh target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dn ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat merupakan program pendukung pelayanan Masyarakat dibidang Pelindungan Masyarakat , dimana Realisasi

program/kegiatan tersebut sangat menentukan indikator capaian tersebut bisa tercapai sesuai target atau telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

- b. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah adanya capaian kinerja melebihi target kinerja pada tahun 2023 akan di munculkan dari salah satu capaian kinerja yang telah ada.
- c. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan akan dimunculkan sebagai evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan selanjutnya, untuk lebih baik dan bisa memenuhi kekurangan kendala / penyebab tidak tercapainya terget kinerja yang sudah di tetapkan, Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut; adalah dengan menambahkan pos anggaran untuk penyediaa

Tabel 2.2
Realisasi Kinerja dan Keuangan Satpol PP Kabupaten Rembang
Tahun 2022

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Anggaran dan Realisasi Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Realisasi Keuangan (%)
1	2	4	5	6	7= (6/5)*100	8	9	10= (9/8)*100
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					8.767.260.004		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					8.767.260.004		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	64,35	64,35	99,46%	7.601.621.854	64,35	0,86
		Nilai IKM OPD	95%	95%	100%	7.601.621.854	95%	0,69
1 05 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase dokumen evaluasi kinerja dengan kualitas baik	75%	75%	100%	44.738.700	100	100
1 1 1 1 2		persentase perencanaan dan penganggaran OPD berkualitas ba	75%	755	100%	44.738.700	100	100
1 1 1 1 3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	5 dok	5 dok	100%	7.339.600	100	100

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Anggaran dan Realisasi Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022		
					Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Realisasi Keuangan (%)
1	2			4	5	6	7= (6/5)*100	8	9	10= (9/8)*100
				Daerah						
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 dok	3 dok	100%	7.339.100	100
1	1	2		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 lap	3 lap	100%	30.000.000	100
1	1	2	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase dokumen pelaporan dengan kualitas baik	75%	75%	100%	6.723.673.075	99,99
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan AS	71 ASN	71 ASN	100%	6.607.879.000	71 ASN
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 lap	3 lap	100%	240.000.000	100
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 lap	2 lap	100%	7.500.000	99,96
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	persentase dokumen pengelolaan BMD dengan kualitas baik	75%	75%	100%	7.500.000	100
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 lap	2 lap	100%	7.500.000	100
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase dokumen manajemen kepegawaian yang dikelola dengan baik	100%	100%	100%	14.000.000	0
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaia	10 dok	8 dok	80%	14.000.000	0
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	119.738.100	99,68
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	3 paket	80%	5.000.000	99,66
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	3 paket	100%	12.500.000	100
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 paket	6 paket	100%	5.000.000	100
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	3 paket	100%	15.000.000	100
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	3 paket	100%	7.175.250	100
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	JuJumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	1 dok	1 dok	100%	2.160.000	99,77

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Anggaran dan Realisasi Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Realisasi Keuangan (%)
1	2	4	5	6	7= (6/5)*100	8	9	10= (9/8)*100
	Perundang-undangan	Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan						
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	1 paket	100%	15.000.000	99,98	0,33
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 laporan	2 laporan	100%	58.000.000	98,49	0,25
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemenuhan layanan administrasi	100%	100%	100%	552.000.000	97,00	0,75
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan	100%	5.000.000	86,21	0,26
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kantor yang Disediakan	3 laporan	3 laporan	100%	79.700.000	93,49	0,86
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	2 laporan	100%	462..240.000	97,62	0,13
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase dokumen pengelolaan BMD yang terpelihara dengan baik	75%	75%	100%	207.000.00	98,61	0,38
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajakny	34 unit	34 unit	100%	52.000.000	98,46	0,28
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	-	5.000.000	98,69	0,45
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	105.000.000	0	0
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	% Kecamatan yang kondusif	80%	80%	100%	1.165.638.150	97,07	0,11
		% Penegakan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	83%	100%		1.165.638.150	97,07	0,11
		Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	100%	100%	100%	1.165.638.150	97,07	0,11
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	persentase kelompok sasaran tibumtranmas yang terbina	80%	100%	100%	1.002.838.350	97,07	0,11
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan,	80%	75%	93,75%	537.000.000	52,96	0,86

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Anggaran dan Realisasi Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Realisasi Keuangan (%)
1	2	4	5	6	7= (6/5)*100	8	9	10= (9/8)*100
	Pengawasan	dan Pengawasan						
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	4 kasus	4 kasus	100%	178.889.190	99,26	0,85
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 dok	1 dok	100%	151.500.000	99%	90
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	6.500.000	100%	100
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 orang	2 orang	40%	136.542.810	2 orang	98
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	80%	75%	93,70%	156.629.800	82,10	0,85
		jumlah warga negara yang memperoleh layanan akiba penegakan hukum perda /perkada	100%	80%	80%	56.500.000	82,10	0,85
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	4 laporan	4 laporan	100%	76.500.000	2 lap	0,1
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	64 laporan	64 laporan	100%	26.056.250	50 lap	25
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	64laporan	55 lap	100%	6.500.000	55 lap	0,66
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	persentase peningkatan SDM PPNS	80%	40%	50%	6.500.000	40%	0,875
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan	8 lap	7 lap	8,75		7 lap	

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Anggaran dan Realisasi Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Realisasi Keuangan (%)
1	2	4	5	6	7= (6/5)*100	8	9	10= (9/8)*100
		Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada						35

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SATPOL PP Kabupaten Rembang

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Satpol PP berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Permendagri Nomor 121 Tahun 2018

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan

Tabel 2.3.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satpol PP Kabupaten Rembang
Tahun 2022

No	Indikator Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Renstra 2020-2021									
1	Indeks Rasa aman	80%	80%	80%	82%	100%				Tujuan
2	Persentase gangguan trantibum yang bias diselesaikan	80%	80%	80%	82%	100%				sasaran
3	Persentase Perda dan perkda yang di tegakan			80%	85%	100%				sasaran
	Renstra 2021-2026									
1	Indeks Rasa aman			80%	82%	100%	80%	82%	84%	Tujuan
2	Persentase gangguan trantibum yang bias diselesaikan			80%	82%	100%	100%	85%	84%	sasaran
3	Persentase Perda dan perkda yang di tegakan			80%	85%	100%	100%	82%	86%	sasaran
	SPM									
1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum perda dan perkada	100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	spm

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SATPOL PP KAB.REMBANG

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu urusan dengan dinamika yang terus menerus berkembang mengikuti pergerakan beberapa variabel seperti ekonomi, sosial, politik maupun perubahan aturan hukum yang berlaku. Dengan adanya dinamika tersebut, maka muncul isu-isu penting yang harus diakomodir maupun ditindaklanjuti karena berpengaruh terhadap Keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Rembang. Berikut uraian isu-isu penting sebagaimana dimaksud

- A.** Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Satpol pp Kab.Rembang dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah.

Tingkat kinerja Satpol PP Kabupaten Rembang dapat dilihat berdasarkan capaian indikator sasaran dan program sebagaimana pada tabel 2.3. secara umum kinerja Satpol PP tergolong baik dikarenakan mampu memenuhi target capaian indikator yang telah ditetapkan.

- B.** Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Satpol PP;

Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi Satpol PP Kabupaten Rembang dalam peningkatan kualitas produk Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Kualitas dan kapasitas SDM Satpol PP yang masih perlu ditingkatkan;
2. Dinamisasi regulasi dan pedoman yang mengatur mekanisme Keamanan dan ketertiban masyarakat;
3. Belum tersedianya prosedur standar operasional pelayanan terhadap kamtibmas pada masyarakat;
4. Masih kurangnya kapasitas kelembagaan OPD yang kurang pro aktif dengan Satpol PP menyebabkan kurang efektifnya proses penertiban dan keamanan dalam mengamankan Perda maupun Perkada;

Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodasi dalam tugas Satpol PP.

- C.** Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional.

Dampak yang dapat muncul sebagai akibat dari permasalahan diatas diantaranya adalah sebagai berikut

1. Rencana pembangunan Keamanan dan ketertiban masyarakat yang telah disusun belum dapat direalisasikan sebagai akibat dari keterbatasan anggaran, sehingga akan berdampak pada capaian

- kinerja indikator maupun urusan dan program kegiatan;
2. Keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan di lingkup Satpol PP Kabupaten Rembang, sehingga capaian program dan kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditetapkan;
 3. Kualitas dokumen pada Satpol PP yang kurang memadai dikarenakan rendahnya validitas data dan waktu penyusunan yang tidak ideal, sehingga *output* dari rencana yang dilaksanakan akan kurang sesuai dengan yang diharapkan;
- D. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam rangka meningkatkan pengembangan pelayanan pada Satpol PP Kabupaten Rembang, diperlukan suatu analisa faktor-faktor yang dapat mendukung dan mempengaruhi keberhasilan serta kegagalan strategi kebijakan, baik analisa tantangan maupun peluang yang dihadapi Satpol PP Kabupaten Rembang, antara lain :

1. Tantangan

Setelah memperhatikan uraian tersebut di atas maka dapat disampaikan beberapa faktor penghambat yang menjadi tantangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan;
- b. Semakin meningkatnya pengawasan / kontrol dari berbagai elemen masyarakat / pemangku kepentingan dan juga DPRD terhadap berbagai kebijakan pembangunan;
- c. Masih terdapat aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses Keamanan dan ketertiban masyarakat partisipatif;
- d. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat Kabupaten Rembang;
- e. Adanya ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap berbagai tahapan/proses Pengamanan dan ketertiban, yang dianggap hanya sebagai formalitas belaka.

2. Peluang

Sedangkan beberapa faktor pendukung yang dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut:

- a. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam Keamanan dan ketertiban masyarakat.
 - b. Terjadinya hubungan yang harmonis dengan OPD lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stake holders)
 - c. Keleluasaan dalam akses informasi sebagai bukti keterbukaan kerjasama dengan berbagai lembaga lain baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten lain, Swasta, Lembaga Donor, LSM, lembaga-lembaga lainnya dan masyarakat luas dengan rasa aman.
- E.** Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

Rekomendasi dan catatan strategis menilik dari permasalahan, tantangan dan peluang adalah sebagai berikut :

1. Perlunya rasa aman dan komprehensif dengan dukungan data yang valid dalam rangka menghadapi kondisi perekonomian yang mengalami perlambatan serta dalam rangka memanfaatkan potensi Kabupaten Rembang secara optimal;
2. Peningkatan fungsi kehumasan dalam bidang Keamanan dan ketertiban masyarakat melalui *city branding* untuk meningkatkan pamor Kabupaten Rembang, sehingga investasi dan pendapatan daerah dapat meningkat sekaligus dalam rangka mengurangi angka Kriminilitas di Kabupaten Rembang.

2.4 Review terhadap RKPD Perubahan Tahun 2023

Review atau telaahan terhadap rancangan awal OPD Kabupaten Rembang tahun anggaran 2023 bertujuan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target RENSTRA SATPOL PP Kabupaten Rembang tahun 2021-2026 dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SATPOL PP Kabupaten Rembang dengan arahan Kepala SATPOL PP Kabupaten Rembang terkait prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif yang disediakan untuk setiap OPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Rembang tahun anggaran 2023 untuk SATPOL PP Kabupaten Rembang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Rembang

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	SAT	Target Capaian	Lokasi	Pagu Indikatif APBD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	SAT	Target Capaian	Lokasi	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					15.467.345.100,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					8.851.632.153	
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDNG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT					15.467.345.100,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDNG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT					8.851.632.153	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a	Nilai Sakip OPD	Angka	95%	Kab.Rem bang	8.207.345.100,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Sakip OPD	%	95	Kab.Rem bang	6.945 .472.153	
		IKM	%	95%	Kab.rbg	8.207.345.100,00		IKM	%	95	Kab.Rem bang	6.945.472.153	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Derah	Persentase perencanaan dan penganggaran OPD berkualitas baik	%	80		55.000.000	Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Derah	Persentase perencanaan dan penganggaran OPD berkualitas baik	%	80		31.750.000	
	Penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah dokumen Perencanaan	dok	5		15.000.000	Penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	dok	5		8.000.000	

	perangkat daerah	Perangkat Daerah yang disusun					perangkat daerah	Perangkat Daerah					
	Penyusunan Renstra, Renja	Jumlah dokumen renstra renja yang dikelola dengan baik	dok	4			Penyusunan Renstra, Renja	Jumlah dokumen renstra renja yang dikelola dengan baik	dok	4			
	Penyelenggaraan Forum OPD	Jumlah dokumen usulan stakeholder yang diakomodir dalam Renja	dok	1			Penyelenggaraan Forum OPD	Jumlah dokumen usulan stakeholder yang diakomodir dalam Renja	dok	1			
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dok	3		15.000.000	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dok	3		7.000.000	
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Laporan kinerja yang disusun, Jumlah Informasi yang Disampaikan Kepublik	Dok / informasi	3		25.000.000	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Laporan kinerja yang disusun, Jumlah Informasi yang Disampaikan Kepublik	Dok / informasi	3		16.500.000	
	Penyusunan LKJIP dan LPPD	Jumlah dokumen LKJIP dan LPPD yang disusun	dok	2			Penyusunan LKJIP dan LPPD	Jumlah dokumen LKJIP dan LPPD yang disusun	dok	2			
	Penyusunan Laporan Pengendalian Kegiatan OPD	Jumlah dokumen yang disusun	dok				Penyusunan Laporan Pengendalian Kegiatan OPD	Jumlah dokumen yang disusun	dok	2			
	Penyusunan Laporan Capaian Renja Triwulanan	Jumlah dokumen yang disusun	dok	1			Penyusunan Laporan Capaian Renja Triwulanan	Jumlah dokumen yang disusun	dok	1			

	Pengelolaan Website	Jumlah akun media sosial yang dikelola	Media/dok	2			Pengelolaan Website satpol pp	Jumlah akun media sosial yang dikelola	Media/dok				
	Pengelolaan Face Print dan E- Kinerja	Jumlah Operator komputer	ob	1			Pengelolaan Face Print dan E- Kinerja	Jumlah Operator komputer	ob	1			
	Pengelolaan Rencana Umum Pengadaan (RUP)	Jumlah Operator komputer	ob	1			Pengelolaan Rencana Umum Pengadaan (RUP)	Jumlah Operator komputer	ob	1			
	Pengelolaan Sistem Informasi Daerah (SIPD)	Jumlah Operator komputer	ob	5			Pengelolaan Sistem Informasi Daerah (SIPD)	Jumlah Operator komputer	ob	5			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/asn	68		6.357.973.100	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/asn	71		6.064.212.146	
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Dokumen pelaporan keuangan dengan Kualitas baik	dok	3		6.072.973.100	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Dokumen pelaporan keuangan dengan Kualitas baik	dok	3		5.860.632.153	
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	lap	2		260.000.000	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	lap	2		189.480.000	
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan	2		25.000.000	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan	2		14.500.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentas dokumen pengelolaan BMD dengan kualitas baik				20,000,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentas dokumen pengelolaan BMD dengan kualitas baik				0	

	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					20.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					0	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen manajemen kepegawaian yang dikelola dengan baik	%	100		290.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen manajemen kepegawaian yang dikelola dengan baik	%	100		8.020.000	
	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dok	20		25.000.000	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dok	10		8.020.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	org	92		250.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	org	71		0	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dok	15		15.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dok	10		0	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	100		385.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	100		169.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	pkt	4		25.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	pkt	4		7.500.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	pkt	3		40.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	pkt	3		17.000.000	
	Penyediaan peralatan	Jumlah Paket Peralatan	pkt	6		15.000.000	Penyediaan peralatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah	pkt	6		5.000.000	

	rumah tangga	Rumah Tangga yang Disediakan					rumah tangga	Tangga yang Disediakan					
	Peyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	pkt	4		65.000.000	Peyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	okt	4		20.000.000	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	pkt	3		25.000.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	pkt	3		15.000.000	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	dok	1		5.000.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	dok	1		4.000.000	
	Penyediaan bahan/material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	pkt	1		35.000.000	Penyediaan bahan/material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	pkt	1		25.000.000	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	lap	2		175.000.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	lap	2		75.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana prasarana pengadaan BMD	%	100		175.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana prasarana pengadaan BMD	%	80		0	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	1		0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	%	80		0	
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	34		25.000.000	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	15(laptop)		0	
	Pengadaan	Jumlah Unit	unit	2		150.000.000	Pengadaan	Jumlah Unit	unit	3		0	

	gedung kantor atau bangunan lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					gedung kantor atau bangunan lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100		704.372.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100		617.680.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	lap	1		5.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	lap	1		1.280.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	lap	3		90,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	lap	3		86,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	lap	2		609.372.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	lap	2		528.888.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase dokumen pengelolaan BMD yang terpelihara dengan baik	%	75		220.000.000	Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase dokumen pengelolaan BMD yang terpelihara dengan baik	%	75		61.582.007	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	20		125.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	20		57.362.007	
	Pemeliharaan/R	Jumlah Sarana	unit	20		25.000.000	Pemeliharaan	Jumlah Sarana	unit	20		0	

	ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi					/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi					
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	3		70,000,000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	3		4,220,000	
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase Penegakan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	90		7.260.000.000,00	PROGRAM PENINGKAT AN KETENTERA MAN DAN KETERTIBA N UMUM	Persentase Penegakan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	80			
		Persentase Kecamatan yang kondusif	%	80		7.260.000.000,00		Persentase Kecamatan yang kondusif	%	80			
		Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	%	100		7.260.000.000,00		Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	%	100		1.900.000.000	
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase Kelompok Sasaran Tibumtranmas yang terbina	%	80		6.010.000.000,	Penanganan Gangguan Ketenterama n dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Kelompok Sasaran Tibumtranmas yang terbina	%	80		1.900.000.000	
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan,	kasus	4		1.000.000.000	Pencegahan Gangguan Ketenterama n dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	kasus	4		1.900.000.000	

		dan Pengawasan					Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan						
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	kasus	4		200.000.000	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Persentase Kelompok Sasaran Tibumtranmas yang terbin	Kelompok	14			
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	dok	1		700.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	dok	1		50.000.000	
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	dok	1		3.750.000.000	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	dok	1		1.050.000.000	
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja	jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan	org	5		220.000.00	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi	jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan	org	5		200.000.00	

	dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya					Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya					
	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	dok	5		30.000.000	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	dok	5		0	
	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	dok	3		110.000.000	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	unit	4		0	
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah pelanggaran perda/perkada yang tertangani	%	80		1.150.000.000	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah pelanggaran perda/perkada yang tertangani	%	80		375.000.000	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum perda dan perkada	%	100		1.150.000.000		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum perda dan perkada	%	100		375.000.000	
	Sosialisasi Penegakan Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan	laporan	4		150.000.000	Sosialisasi Penegakan Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi	laporan	4		50.000.000	

	Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/					Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/					
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	lap	64		550,000,000	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	lap	64		75,000,000	
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	lap	64		450,000,000	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	lap	64		250,000,000	
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan SDM PPNS	%	80		100,000,000	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan SDM PPNS	%	80		25,000,000	

	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	dok	8	100,000,000	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	dok	8	25,000,000	
--	--	---	-----	---	-------------	--	---	-----	---	------------	--

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Satpol PP Kabupaten Rembang

Secara umum, rencana kinerja Satpol Pp Kabupaten Rembang Tahun 2023 telah menggambarkan kebutuhan pendanaan Program dan Kegiatan Satpol PP pada Tahun 2023 namun pada tahap perencanaan di tahun 2023 ini dapat terjadi dinamika perubahan yang mungkin saja terjadi perubahan anggaran pada akhir tahun karena adanya penyesuaian pada saat pembahasan kebijakan umu Anggaran (KUA) dan prioritas dan plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada sisi legislative ,di mana program dan kegiatan perlu mengakomodir spirasi dari masyarakt.

1. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Satpol PP;

Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi Satpol PP Kabupaten Rembang dalam peningkatan kualitas produk Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah sebagai berikut :

5. Kualitas dan kapasitas SDM Satpol PP yang masih perlu ditingkatkan;
6. Dinamisasi regulasi dan pedoman yang mengatur mekanisme Keamanan dan ketertiban masyarakat;
7. Belum tersedianya prosedur standar operasional pelayanan terhadap kamtibmas pada masyarakat;
8. Masih kurangnya kapasitas kelembagaan OPD yang kurang pro aktif dengan Satpol PP menyebabkan kurang efektifnya proses penertiban dan keamanan dalam mengamankan Perda maupun Perkada;

2. Adanya Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan dapat tertuang di table 2.4 sebagai berikut

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Rembang

Nama Satpol PP Kab.Rembang

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Pekerjaan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program : Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum Kegiatan : 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Sub keg : 1.05.02.2.02.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Pekerjaan : Pembinaan kasi trantib (penyuluhan)	Kab.Rembang	Indikator Program : persentase Penegakan Pelanggaran Produk Hukum Daerah, Persentase Kecamatan yang kondusif, Tingkat penyelesaian pelanggran K3 Indikator kegiatan : Persentase Kelompok Sasaran Tibumtranmas yang terbina Indicator keg : Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan,	3blnx1 kali kegiatan	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Pekerjaan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			dan Pengawasan		
2	Program : Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum Kegiatan : Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kab/kota Sub Keg : Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan sarlinmas termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Ham Pekerjaan : kesempataan,pemenuhan sarana prasarana seperti : dakura	Kab Rembang	Indikator Program : persentase Penegakan Pelanggaran Produk Hukum Daerah, Persentase Kecamatan yang kondusif, Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 Indikator kegiatan : Persentase Kelompok Sasaran Tibumtranmas yang terbina Indicator keg : Indikator Program : persentase Penegakan Pelanggaran Produk Hukum Daerah, Persentase Kecamatan yang kondusif, Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 Indikator kegiatan :	20 pcs dakura	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Pekerjaan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Persentase Kelompok Sasaran Tibumtranmas yang terbina Indicator keg : Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan,		
3	Program : Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum Kegiatan : Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kab/kota Sub keg : Pemberdayaan perindungan msyarakat dalam rangka ketenteraman dan kertiban umum Pekerjaan : Apel gelar pasukan linmas	Kab.Rembang	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1x12bln	
4	Program : Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum Kegiatan : Penegakan peraturan daerah Kabupaten/kota dan	Kab.Rembang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan	48 kegiatan (1thn)	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Pekerjaan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	peraturan Bupati/Walikota Sub keg : Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati/walikota Pekerjaan : Penertiban pelanggaran peraturan Daerah dan peraturan kepala Daerah		Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP		

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN SATPOL PP
KABUPATEN REMBANG

3.1. Telaahan Renstra SATOPOL PP Provinsi Jawa Tengah (2018-2023)

3.1.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Renstra Kementerian dalam Negeri ada beberapa target yang merupakan sasaran strategis yang memerlukan dukungan Satpol PP provinsi maupun kabupaten/kota kabupaten/kota yaitu :

1. Sasaran strategis : Meningkatnya persatuan dan kesatuan bangsa, dengan target indikator berupa Jumlah peristiwa konflik social dengan data awal tahun 2015 : ≤ 83 peristiwa dan tahun 2019 : ≤ 83 peristiwa.
2. Sasaran strategis : Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dengan indicator :
 - a. Persentase penerapan SPM di daerah (provinsi/kabupaten/kota) tahun 2015 : 75 % dan tahun 2019 : 90 %.
 - b. Persentase daerah yang memenuhi pelayanan dasar tahun 2015 : - dan tahun 2019 : 60 %.
 - c. Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban sesuai SPM tahun 2015 : 20 % dan tahun 2019 : 60 %
 - d. Persentase pemerintah daerah yang menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan public tahun 2015 : 100 % provinsi tahun 2019 : 100 % provinsi

Telaahan Renstra Provinsi Sesuai Renstra Satpol PP Provinsi Jawa Tengah Tahun Tahun 2018-2023 tertuang Strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum
2. Meningkatkan penegakan produk hukum Daerah
3. Meningkatkan kemampuan/kapasitas anggota Satlinmas
4. Meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap ketertiban umum dan ketentraman

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SATPOL PP KABUPATEN REMBANG

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Satpol PP kabupaten Rembang pada tahun 2024 meliputi :

- Tujuan : Meningkatkan kualitas layanan publik dalam hall keamanan dan ketertiban
- Sasaran : Meningkatnya kualitas penanganan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh SATPOL PPKabupaten Rembang.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

A. Tujuan

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh SATPOL PP Kabupaten Rembang dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026, adalah :

A. Meningkatkan Kualitas layanan public dalam hal keamanan dan ketertiban

Tujuan tersebut selaras dengan tupoksi Satpol PP dalam Bidang Pemerintah Kabupaten Rembang yaitu Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dengan upaya upaya sebagai berikut

1. Meningkatkan rencana kegiatan dibidang administrasi kepegawaian, keuangan perlengkapan (umum), pengawasan, pengendalian serta merencanakan program Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Meningkatkan Indeks Rasa Aman Masyarakat
3. Meningkatkan kualitas SDM untuk mewujudkan aparatur pemerintah dan masyarakat yang berkualitas melalui pelatihan bimbingan teknik.
4. Meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam mentaati peraturan daerah dan Peraturan kepala daerah
5. Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum, serta menegakan perda dan Peraturan kepala daerah melalui sosialisasi.

Tujuan tersebut selaras dengan tujuan yang melekat dalam misi pertama RJPMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 yaitu mewujudkan Mengembangkan Profesionalisasi,moderenisasi organisasi dan Tata Kerja Birokrasi

Tujuan sebagaimana tersebut berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Rembang

Nomor Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang. Dalam hal ini Satpol PP Kabupaten Rembang diharapkan menjadi koordinator yang mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang baik melalui penelitian dan pengembangan yang selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan, penelitian dan pengembangan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Rembang dapat tercapai.

B. Sasaran

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Satpol PP Kabupaten Rembang menetapkan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Bappaeda dalam rangka pencapaian tujuan Satpol PP selama tahun 2021-2026, dijabarkan sebagai berikut:

A. Meningkatnya kualitas penanganan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Tujuan dan sasaran jangka menengah Pelayanan Satpol PP Kabupaten Rembang tahun 2021-2026, dapat dijabarkan sebagaimana pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satpol PP Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026

Tabel 3.1

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATU AN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatkan kualitas layanan public dalam hal keamanan dan ketertiban		Indeks Rasa aman	%	80	80	80	82	84	86	88
2		Meningkatnya kualitas penanganan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Persentase gangguan trantibum yang 43ias diselesaikan	%	80	80	80	85	85	90	90

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATU AN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3			Persentase Perda dan perkd yang di tegakan	%	80	80	80	82	84	86	88

Hal-hal yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran Satpol PP adalah:

a. Partisipasi.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan mutlak diperlukan, tanpa adanya partisipasi masyarakat pembangunan hanyalah menjadikan masyarakat sebagai objek semata. Penempatan masyarakat sebagai subjek pembangunan mutlak diperlukan sehingga masyarakat akan dapat berperan serta secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi pembangunan. partisipasi para pelaku pembangunan (*Stakeholders*) di dalam proses perencanaan sangat mempengaruhi arah kebijakan perencanaan yang dihasilkan. Semakin intensifnya peran pelaku pembangunan di dalam proses perencanaan, output perencanaan yang dihasilkan akan semakin menggambarkan kebutuhan riil masyarakat

b. Sumber Daya Manusia.

perencana yang baik harus memiliki pengetahuan yang cukup dan visi yang jelas, sehingga kualitas perencanaan yang dihasilkan bisa dijadikan acuan pembangunan secara umum.

c. Data

kegiatan perencanaan harus berdasarkan data yang lengkap dan akurat, oleh karena itu peran data di dalam kegiatan perencanaan merupakan hal yang penting;

d. Dana

kegiatan perencanaan memerlukan biaya untuk pelaksanaan proses perencanaan mulai dari penjaringan aspirasi dari seluruh pelaku pembangunan sampai pada perumusan kebijakan;

e. Sarana

sarana yang tersedia akan menunjang dalam peningkatan kualitas perencanaan

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Satpol PP Kab.Rembang

Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Kepala Daerah Tahun 2021-2026, SATPOL PP Kabupaten Rembang perlu menetapkan tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah, serta

didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan:

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah Kab.Rembang pada tahun 2021-2026 yang mendatang sebagai berikut :

Visi : Mewujudkan Rembang Gemilang 2026

Misi :

- a. Mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasai dan tata kerja birokrasi
- b. Mengembangkan sumber daya manusia yang semakin berkualitas dan terproteksi jaminan sosial
- c. Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
- d. Mengembangkan kemandirian desa berbasis potensi lokal

Satuan Polisi Pamong Praja mengikuti Misi Ke 1 dari Misi Kepala daerah Kabupaten Rembang yaitu “Mengembangkan Profesionalisasi,modernisasi organisasi dan tata kerja birokrasi” berkaitan langsung dengan tugas dari satuan polisi pamong praja yaitu meningkatkan ketertiban umum ketenteraman masyarakat.

Rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan, Satpol PP Kabupaten Rembang antara lain meliputi:

- Jumlah program 2 Prorgamm yaitu
 - a. Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota
 - b. Program Peningkatan Ketenteraman dan ketertiban umum

Jumlah Kegiatan 10 kegiatan dan jumlah sub Kegiatan 35 terdiri dari

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabuapten/Kota

INDIKATOR :

1. Nilai sakip OPD

2. Nilai IKM OPD

Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat DaerahPeningkatan sarana dan prasarana aparatur
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah

Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Untuk Indikator Program yaitu

INDIKATOR :

- 1. Persentase Penegakan Pelanggaran Produk Hukum Daerah**
- 2. Persentase kecamatan yang kondusif**
- 3. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3**

Kegiatan :

1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

Dengan jumlah program dan kegiatan yang ada maka kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya satpol PP Tahun Anggaran 2024 sejumlah Rp. 15.467.345.100

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
SATPOL PP KABUPATEN REMBANG

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan strategis, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Satpol PP Kabupaten Rembang.

Adapun rincian program dan kegiatan yang mendukung fungsi penunjang urusan Pemerintahan utamanya perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabuapten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat DaerahPeningkatan sarana dan prasarana aparatur
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

B. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

Jumlah program dan kegiatan untuk Rencana Kerja Satpol PP Kabupaten Rembang adalah sejumlah 2 program yang terdiri dari 11 kegiatan. Kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya yaitu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024

**Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Satpol PP Kab.Rembang
Tahun 2024 dan Prkiraan Maju 2025**

Tabel 4.1

1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Ka.Rembang		8.845.472.153	APBD			12.256.345.100
#	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		Ka.Rembang		8.845.472.153	APBD			12.256.345.100

					ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	Ka.Rembang	64,95	6.945.472.153	APBD		65,15	7.801.345.100
#	1												
						Nilai IKM	Ka.Rembang	100%	6.945.472.153	APBD		100%	7.801.345.100
					Perencanaan,Penganggaran,da n evaluasi kinerja perangkat daerah	persentase dokumen evaluasi kinerja dengan kualitas baik	Ka.Rembang	80%	31.750.000	APBD		85%	70.000.000
#	1	1											
						persentase perencanaan dan penganggaran OPD berkualitas baik	Ka.Rembang	80%	31.500.000	APBD		85%	70.000.000
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Ka.Rembang	5 dok	8.000.000	APBD		5 dok	20.000.000
#	1	1	1										
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Ka.Rembang	3 dok	7.000.000	APBD		4 dok	20.000.000
#	1	1	2										
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ka.Rembang	3 lap	16.75.000	APBD		4 lap	30.000.000
#	1	1	3										

					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase dokumen pelaporan dengan kualitas baik	Ka.Rembang	80%	6.058.052.146	APBD		90%	6.377.973.100
	#	1	2		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan AS	Ka.Rembang	68 org	5.854.072.146	APBD		68 org	6.072.973.100
	#	1	2	1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Ka.Rembang	3 dok	189.480.000	APBD		3 dok	275.000.000
	#	1	2	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Ka.Rembang	2 lap	14.500.000	APBD		2 lap	30.000.000
					Administrasi barang milik daerah	Persentas dokumen pengelolaan BMD dengan kualitas baik	Ka.Rembang	80%	0	APBD		85%	0
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0				0
	#	1	2	3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase dokumen manajemen kepegawaian yang dikelola dengan baik	Ka.Rembang	100%	8.020.000	APBD		100%	30.000.000
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Ka.Rembang	92 paket	0	APBD		92 paket	

					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Ka.Rembang	10 dok	8.020.000	APBD		15 dok	30.000.000
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Ka.Rembang	15 org	0	APBD		15 org	0
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Ka.Rembang	100%	169.000.000	APBD		100%	427.000.000
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Ka.Rembang	4 paket	7.500.000	APBD		4 paket	30.000.000
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Ka.Rembang	3 paket	17.500.000	APBD		4 lap	45.000.000
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Ka.Rembang	6 paket	5.000.000	APBD		7 lap	20.000.000
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Ka.Rembang	3 paket	20.000.000	APBD		3 lap	75.000.000
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Ka.Rembang	3 paket	15.000.000	APBD		3 lap	30.000.000
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	JuJumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Ka.Rembang	1 dok	4.000.000	APBD		2 dok	7.000.000

					Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Ka.Rembang	1 paket	25.000.000	APBD		3 paket	40.000.000
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ka.Rembang	2 laporan	75.000.000	APBD		4 paket	180.000.000
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana prasarana pengadaan BMD	Ka.Rembang	100%	0	APBD		100%	0
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Ka.Rembang	34 unit	0	APBD		34 unit	0
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Ka.Rembang	2 unit	0	APBD		2 unit	0
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Ka.Rembang	100%	617.068.000	APBD		100%	716.372.000
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Ka.Rembang	2 lap	1.280.000	APBD		2 lap	7.000.000
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kantor yang Disediakan	Ka.Rembang	3 lap	86.900.000	APBD		4 lap	100.000.000

					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Ka.Rembang	3 lap	528.888.000	APBD		3 lap	609.372.000
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase dokumen pengelolaan BMD yang terpelihara dengan baik	Ka.Rembang	80%	61.582.007	APBD		85%	180.000.000
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Ka.Rembang	34 unit	57.362.007	APBD		34 unit	150.000.000
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Ka.Rembang	34 unit	4.220.000	APBD		34 unit	30.000.000
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Ka.Rembang	4 unit	0	APBD		4 unit	0
					PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kecamatan yang kondusif	Ka.Rembang	90%	1.900.000.000	APBD		95%	4.455.000.000
						Persentase Penegakan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	Ka.Rembang	80%	1.900.000.000	APBD		80%	4.455.000.000
						Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban,	Ka.Rembang	100%	1.900.000.000	APBD		100%	4.455.000.000

					Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	persentase kelompok sasaran tibuntranmas yang terbina	Ka.Rembang	80%	1.500.000.000	APBD		85%	2.955.000.000
					Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Ka.Rembang	4 kasus	200.000.000	APBD		4 kasus	975.000.000
					Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Ka.Rembang	4 kasus	0	APBD		4 kasus	0
					Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat	Ka.Rembang	1 dok	50.000.000	APBD		1 dok	850.000.000

					Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Ka.Rembang	1 dok	1.050.000.000	APBD	untuk kegiatan pemilu Rp. 3.000.000.000	1 dok	850.000.000
					Kerjasama antara lembaga dan kemitran dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Ka.Rembang	5 org	0	APBD		5 org	0
					pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Ka.Rembang	3 dok	0	APBD		3 dok	0
					Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Ka.Rembang	5 org	200.000.000	APBD		3 unit	280.000.000
					Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	jumlah warga negara yang memperoleh layanan akiba penegakan hukum perda /perkada	Ka.Rembang	100%	375.000.000	APBD		100%	1.300.000.000

							persentase pelanggaran perda/perkada yang tertangani	Ka.Rembang	80%	375.000.000	APBD		80%	1.300.000.000
						Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	Ka.Rembang	64 laporan	50.000.000	APBD		64 laporan	200.000.000
						Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Ka.Rembang	64 laporan	75.000.000	APBD		64 laporan	600.000.000
						Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Ka.Rembang	64 laporan	250.000.000	APBD		64 laporan	500.000.000
						Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	persentase peningkatan SDM PPNS	Ka.Rembang	80%	25.000.000	APBD		80%	200.000.000

					Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Ka.Rembang	8 lap	25.000.000	APBD		8 laporan	200.000.000
--	--	--	--	--	--	---	------------	-------	------------	------	--	-----------	-------------

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 adalah merupakan dokumen rancangan akhir dalam melakukan perencanaan pengendalian evaluasi program-program dan sasaran maupun prioritas yang akan di laksanakan setiap Tahun nya.dengan mengedapankan permasalahan permasalahan yang berbasis masyarakat melalui pelaksanaan broblem solving dengan melibatkan masyarakat serta pelaku-pelaku yang terkait (*stakeholders*) guna menciptakan *Good Governance* dalam mendukung visi misi RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 serta berupaya untuk mewujudkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Rembang.

Adapun upaya untuk mengetahui keberhasilan pencapaian target dalam pelaksanaan pelayanan perlu adanya pelaksanaan evaluasi pada Tahun sebelumnya dan di tunjang dengan melihat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang dilakukan.

Rencanan Kerja (RENJA) Tahun 2024 dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan secara transparan, responsif, efisien dan efektif dimana masyarakat berhak memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara, selanjutnya dapat melakukan antisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di Daerah melalui cara atau proses yang paling optimal.

Rembang, Agustus 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN REMBANG



SULISTIYONO, A.P.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730528 199311 1 002